

# **EFEKTIVITAS PERAN BADAN ARBITRASE PASAR MODAL INDONESIA DALAM PENYELESAIAN PERDATA KHUSUS ARBITRASE PADA PUTUSAN MA NOMOR 86/B/Pdt.Sus-Arbit/2014**

**GIVENTI HANDI**

## **ABSTRAK**

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menjelaskan tentang dasar pertimbangan hukum pembatalan Putusan Badan Arbitrase Nasional Nomor BAPMI-006/ARB-05.VII/2012, dan mendeskripsikan tentang dasar pertimbangan hukum Mahkamah Agung RI dalam penyelesaian sengketa perdata khusus arbitrase pada Putusan Nomor 86/B/Pdt.Sus-Arbit/2014. Di samping itu, untuk menjelaskan tentang efektivitas peran BAPMI dalam penyelesaian sengketa perdata khusus arbitrase pada Putusan Nomor 86/B/Pdt.Sus-Arbit/2014. Teori yang digunakan adalah efektifitas hukum, yang memandang Hukum akan menjadi efektif jika tujuan keberadaan dan penerapannya dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan dapat menghilangkan kekacauan. Hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang dirancang dapat diwujudkan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif normatif, yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberi data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya dengan cara mengumpulkan data, menyusun, mengklasifikasi, dan menginterpretasikannya. Hasil penelitian ini dirumuskan bahwa dasar pertimbangan pembatalan Putusan BAPMI 006 yang diajukan oleh Para Pemohon adalah didasari oleh ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa pada pasal 70 dan penjelasan pasal 70 dengan mengacu pada kata/frase “antara lain” yang memungkinkan bagi Para Pemohon mengajukan banding untuk permohonan pembatalan Putusan BAPMI 006 berdasarkan dalil-dalil dan/atau argumentasi serta peristiwa hukum dari adanya pengunduran diri Termohon III dan Termohon IV berakibat hukum adanya pelanggaran ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Peraturan dan Acara BAPMI oleh Termohon II tanpa mendapatkan persetujuan atau kesepakatan dari Para Pihak telah memproklamkan dirinya sebagai Arbiter Tunggal yang membacakan Putusan Arbitrase 006. Peran BAPMI dalam perkara Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 86/B/Pdt.Sus-Arbit/2014 dapat dikatakan tidak efektif dikarenakan Majelis Arbitrase di tengah proses Musyawarah Majelis Arbitrase dalam perkara Putusan Arbitrase 006 telah terjadi pengunduran diri dari Termohon III dan Termohon IV yang diduga adanya tekanan dari pernyataan surat Termohon II yang mengutip ketentuan dari KUHP, serta adanya penunjukkan tanpa persetujuan dari Para Pihak dimana Termohon II secara diri sendiri menyatakan dirinya sebagai Arbiter Tunggal telah melanggar ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Peraturan dan Acara BAPMI

Kata kunci : Penyelesaian sengketa

**EFFECTIVENESS OF INDONESIAN INDONESIAN CAPITAL  
MARKET ARBITRATION ROLE IN SPECIALIZATION OF SPECIAL  
ARBITRATION REGULATION IN DECISION OF MA NUMBER 86 / B  
/ Pdt.Sus-Arbit / 2014**

**GIVENTI HANDI**

**ABSTRACT**

*This research is conducted to know and explain the basic of the consideration of the law of cancellation of National Arbitration Board Decision Number BAPMI-006 / ARB-05.VII / 2012, and to describe on the basis of legal considerations of the Supreme Court of the Republic of Indonesia in the settlement of a special arbitration civil disputes in Decision Number 86 / B / Pdt.Sus-Arbit/2014. In addition, to explain the effectiveness of the role of BAPMI in the settlement of arbitration-specific civil disputes in Decision Number 86 / B / Pdt.Sus-Arbit / 2014. Theory used is the legal effectiveness, which views the Law will be effective if the purpose of existence and its application can be preventing unwanted deeds can eliminate chaos. Effective law in general can make what is designed to be realized. The research method used is descriptive normative research, which is a study intended to provide as much data as possible about humans, circumstances or other symptoms by collecting data, preparing, classifying, and interpreting. The results of this study formulated that the basic consideration of the cancellation of BAPMI 006 Decision filed by the Petitioners is based on the provisions of Law Number 30 Year 1999 on Arbitration and Alternative Dispute Settlement in article 70 and Article 70 with reference to the word / phrase "among others "Which makes it possible for the Petitioners to file an appeal for the cancellation of BAPMI 006 Decision based on the arguments and / or arguments and legal event of Resignation III and Respondent IV resignation resulted in a law violating the provisions of Law Number 30 Year 1999 regarding Arbitration and Alternative Settlement of Disputes and Regulations and Events of BAPMI by Respondent II without obtaining approval or agreement from the Parties has proclaimed itself as the sole arbitrator who read out the Arbitration Judgment 006. The role of BAPMI in the case of Supreme Court Decision Number 86 / B / Pdt.Sus-Arbit / 2014 can be said not effective due to the Arbitration Tribunal in the process of the Arbitration Assembly Congress in the case of the Arbitration Round of 006 the resignation of Respondent III and Respondent IV allegedly under pressure from the statement of the Respondent II letter citing the provisions of the Criminal Code and the appointment without the consent of the Parties to which the Respondent II self-declared himself as the Sole Arbitrator has violated the provisions set forth in Law No. 30 of 1999 on Arbitration and Alternative Dispute Resolution and Regulations and Events BAPMI*